

Rasionalisme dalam Perkembangan Ekonomi Mainstrim dan Islam di Indonesia

Nurizal Ismail

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Tazkia
Nurizal@tazkia.ac.id

Siti Aisyah

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Gunadarma
aisyahdaruss@staff.gunadarma.ac.id

Wahyudi Bakri

Dosen Program Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor
bakri_wahyudi@yahoo.com

Abstract

Rationalism is one of the philosophical schools originated from Greek Civilization. Two prominent scholars developed the theory, namely Plato and Aristotle. The ratio is a crucial way to approach truth. The rationalism has influenced all knowledge and sciences developed by other scholars in different time and place. The study aims to know the influence of rationalism toward economic development in Indonesia. To obtain a clear answer, the study used thematic analysis to identify, categorize, and report the qualitative data related to the study. The finding says that rationalism has been adopted by Indonesia when it used either capitalism or socialism in the development of economic in Indonesia. The existence of Islamic economics in Indonesia gives a new paradigm of the method in understanding and solve the economic problem by using ratio in the framework of Islamic revelation. By then, there is a fundamental difference of philosophical underpinning related to the development of economic in Indonesia, starting from a conventional one to Islamic economics combining ratio and revelation to solve the economic problem of society.

Keywords: *Rationalism, Economics, Islamic, Indonesia*

1. Pendahuluan

Rasionalisme merupakan salah satu mazhab filsafat ilmu pengetahuan yang berasal dari tradisi keilmuan Yunani. Ada dua tokoh sentral dalam perkembangan filsafat ilmu pengetahuan yaitu Aristotle dan Plato. Plato adalah seorang rasionalis yang menganggap bahwa cara yang terbaik menuju pada pengetahuan yaitu melalui kontemplasi dan pemikiran spekulatif murni. Maka dalam rasionalisme akal merupakan faktor yang fundamental dan utama dalam mencari sebuah kebenaran dalam pengetahuan.

Dalam hubungannya dengan agama, untuk mencari kebenaran mereka tidak memperdulikan ajaran agama yang menurut mereka belum terlihat secara nyata kebenarannya, maka mereka akan lebih memilih untuk mencari kebenaran dengan melalui pembuktian, logika, dan menganalisa berdasarkan fakta, daripada melalui iman, dogma atau ajaran agama.

Paham rasionalis telah mempengaruhi perkembangan pengetahuan di dunia. Misalnya dalam bidang hukum, menurut Barus (2013) bahwa rasionalisme adalah salah satu unsur yang membangun peta konseptual penelitian hukum normatif di Indonesia.¹ Dalam bidang ekonomi, akal atau intelektual merupakan faktor utama dalam menentukan keputusan ekonomi.

Kelembagaan ekonomi dilatar belakangi oleh kekuatan falsafah liberalisme, rasionalisme atau intelektualisme, individualisme, dan materialisme yang semuanya tercakup dalam ekonomi Kapitalisme (Soetrisno, 1992).² Sama halnya dengan ilmu dan kelembagaan ekonomi Indonesia yang banyak terpengaruh oleh Paham kapitalisme di masa kolonialisme. Karena itu studi ini mencoba untuk menganalisa pengaruh aliran rasionalisme dalam perkembangan ilmu ekonomi Indonesia dan bagaimana hubungannya dengan ekonomi Islam yang merupakan disiplin ilmu yang tengah berkembang dan diimplementasikan di Indonesia.

¹ Zulfadli Barus, Z. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2). Hal. 307-318.

² Sutrisno Prawiroharjono. "Kapita Selekta Ekonomi Indonesia." Yogyakarta: Andi Offset (1992).

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam studi ini menggunakan *library research* karena kajiannya difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan menelusuri dan menelaah literatur-literatur yang berstandar akademik yang tujuannya untuk menggambarkan dan menjelaskan rasionalisme dalam ekonomi mainstrim dan Islam di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga menggunakan analisa tematik melalui proses koding tema-tema yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Analisa tema (*Thematic Analysis*) adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, menganalisa, melaporkan tema-tema dalam data.³ Sehingga bisa dikatakan analisa tema merupakan analisa data yang digunakan peneliti untuk menggambarkan dan menjelaskan tujuan penelitian.

3. Teori Rasionalisme

Penggagas dasar rasionalisme adalah Rene Descartes, yang disebut juga sebagai bapak filsafat modern. Menurutnya, ia meyakini bahwa sumber pengetahuan yang benar adalah rasio, bukan mitos, dan bukan wahyu.⁴ Rasionalisme adalah faham atau aliran yang berdasar rasio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki.⁵ Secara etimologis menurut Bagus (2002), rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris *rationalism*,⁶ sedangkan Edwards (1967) mengatakan kata ini berakar dari bahasa Latin *ratio* yang berarti “akal”,⁷ Lacey (2000) menambahkan bahwa berdasarkan akar katanya rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegang bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran.⁸

Definisi umum dari rasionalisme adalah keyakinan yang

³ Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), p.77-101. Retrieved from http://eprints.uwe.ac.uk/11735/2/thematic_analysis_revised_-_final.pdf, accessed on February 10, 2020. hal. 83.

⁴ Muhammad Bahar Akkase Teng. “Rasionalis dan Rasionalisme dalam Perspektif Sejarah.” *Jurnal Ilmu Budaya* 4.2 Desember (2016). hal. 18.

⁵ Setia Budhi Wilardjo. “Aliran-Aliran dalam Filsafat Ilmu berkait dengan Ekonomi.” *Value Added| Majalah Ekonomi dan Bisnis*, 6 (1). (2009) hal. 3.

⁶ Lorens Bagus. *Kamus Filsafat*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama. 2002. hal. 929.

⁷ Paul Edwards. *The Encyclopedia of Philosophy Volume 7*, New York, The Macmillan Company & The Free Press, 1967. hal. 69.

⁸ A.R. Lacey. *A Dictionary of Philosophy*. New York, Routledge. 2000. hal. 286.

kehidupanmu harus berdasarkan akal dan logika dari pada emosi dan keyakinan agama⁹ Adapun yang berkaitan dengan filsafat, doktrin bahwa pengetahuan tentang realitas hanya bisa didapatkan melalui akal tanpa menggunakan pengalaman, atau doktrin bahwa pengetahuan manusia kesemuanya dapat tercakup dalam sistem yang tunggal yaitu deduktif (<https://www.collinsdictionary.com/>). Plato meyakini bahwa pengetahuan berada dalam jiwa dari pada indera-indera kita, sehingga menurutnya bahwa filsafat mulai dari kemampuan manusia untuk mengetahui sesuatu.¹⁰ Ada anggapan rasional epistemologi bahwa indera-indera adalah sumber-sumber pengetahuan yang tidak reliabel, tetapi intelektual itu reliabel selama digunakannya dengan jelas (Heyne, 1997).¹¹

Para rasionalis umumnya mengembangkan pandangan mereka dengan dua cara. Pertama, mereka berpendapat bahwa ada banyak kasus dimana isi dari konsep atau pengetahuan kita melampui informasi melalui pengalaman panca indera. Kedua, mereka membangun intelektual dari berbagai bentuk dan lainnya menyediakan informasi tentang dunia. Metode yang digunakannya adalah deduksi, yaitu proses mencari kebenaran melalui premis-premis umum kepada yang khusus.

4. Pengaruh Rasionalisme dalam Ilmu Ekonomi

4.1. Perilaku Ekonomi

Tentang perilaku ekonomi manusia yang berkaitan dengan konsep ekonomi manusia, yaitu *homoeconomicus*. Ada dua kelompok yang memandang tentang *homoeconomicus*, yaitu kelompok pertama yang memandang bahwa memang secara sifat dasarnya manusia rasional dalam berekonomi, dan kelompok kedua memandang bahwa *homoeconomicus* bukanlah satu-satunya sifat dasar manusia, karena manusia sebenarnya bersifat sosial (*madaniyyun bil tab'i*) dan religius. Perbedaan ini terlihat pada

⁹ <https://www.collinsdictionary.com/>

¹⁰ Paul K. Moser & Arnold Vander Nat. *Human Knowledge: Classical and Contemporary Approaches* (2nd ed.). New York: Oxford University Press. 1995.

¹¹ Paul Heyne. "Rationalism and Anti-Rationalism in the Origins of Economics: The Philosophical Roots of 18th Century Economic Thought," by ColemanWilliam Oliver. Edward Elgar Publishing Ltd., Aldershot and Brookfield. 1995. Pp. viii, 177. *Journal of the History of Economic Thought*, 19(2). hal. 312.

sumber keputusan perilaku ekonomi antara akal dan nilai religius.

Keyakinan kelompok pertama ini lah merupakan turunan dari paham rasionalis bahwa akal atau intelek adalah satu-satunya jalan menuju dalam keputusan ekonomi atau perilaku ekonomi. Pada titik ini jelas bahwa secara aksiologis fungsi ilmu ekonomi hanya mengikuti rasio atau keinginan maupun kepentingan subjektif manusia, dalam aktivitasnya seperti konsumsi, produksi dan distribusi. Dengan demikian menurut Chapra (2001), ilmu ekonomi hanya memperhatikan perilaku rasional manusia ekonomi yang dimotivasi hanya oleh dorongan untuk memenuhi kepentingan dirinya dengan cara memaksimalkan kekayaannya dan konsumsinya lewat cara apapun.¹²

4.2. Kebijakan Ekonomi

Dalam kebijakan ekonomi paham ini menekankan pada kebebasan manusia dalam berekonomi tanpa adanya intervensi negara dan otoritas agama dalam kehidupan ekonomi manusia. Lebih tepatnya Pusey (1991) dalam bukunya mendefinisikan paham rasional ekonomi adalah dogma-dogma yang mengatakan bahwa pasar dan uang dapat selalu melakukan yang paling baik dari pemerintah, birokrasi dan hukum.¹³

Hal ini merupakan ciri dari rasionalisasi ekonomi (*economic rationalism*) yaitu Kebijakan ekonomi yang didasarkan pada efisiensi kekuatan pasar, ditandai dengan intervensi pemerintah minimal, pemotongan pajak, privatisasi, dan deregulasi pasar tenaga kerja (<https://www.collinsdictionary.com/>). Dapat disimpulkan dalam rasionalisasi ekonomi itu akan efisien ketika intervensi pemerintah itu sangat minimal.

¹² Muhammad Umer Chapra. Masa depan ilmu ekonomi: sebuah tinjauan Islam. Gema Insani. 2001. hal. 19.

¹³ Michael Pusey. Economic Rationalism in Canberra. The Cambridge University Press, USA. 1991. Ch.4-5, hal. 134-160.

5. Sistem Ekonomi Indonesia

Menurut Emil Salim, dalam perkembangannya sejak 1945, sistem ekonomi Indonesia bergerak dari kiri dan kekanan mengikuti gerak bandul jam. Mula-mula mengarah kepada haluan sosialis, tetapi kemudian berbalik ke kanan, ke haluan liberal (Raharjo, 2009).¹⁴ Hal ini terlihat dari pola kebijakan-kebijakan ekonomi di tahun 1950 yang memunculkan perselisihan ideologi antara ekonomi koperasi oleh Hatta, Sosialis agama oleh Sjafruddin, dan Sumitro dengan inisiasi kapitalisme modernnya.¹⁵

Hatta, lebih menekankan kepada pengembangan koperasi. Sumitro Djojohadikusumo lebih cenderung pada menampilkan peranan BUMN. Sedangkan Sjafruddin Prawiranegara menekankan preferensinya pada pengembangan sektor swasta, termasuk asing dalam pengembangan perekonomian Indonesia.¹⁶ Perbedaan pandangan ketiga tokoh itu dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1: Spektrum Pemikiran tentang Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia

No	Hatta	Sumitro	Syafruddin
1.	Pembangunan dengan sistem perencanaan sentral	Analisa pembayaran kebijakan ekonomi	Stabilitas ekonomi moneter ketat anti inflasi
2.	Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat	Industrialisasi substitusi Impor	Anggaran berimbang
3.	Peningkatan daya beli masyarakat	Nasionalisasi perusahaan asing	Swasembada pangan

¹⁴ M. Dawam Raharjo. "Menuju sistem perekonomian Indonesia." UNISIA 32.72 (2009). hal. 114.

¹⁵ Muhammad Hanif al-Hakim. "A Nexus between Identity Awareness and Decolonization Process of Local Economy: Indonesian Experience." Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law 1.1 (2017): hal. 7.

¹⁶ Ibid.

4.	Pengembangan industri rakyat	Anggaran berimbang dinamis (Keynessian)	Produksi berdasarkan prinsipkeuntungan komparatif (Ricardian)
5.	Mendorong gerakan koperasi	Bantuan luar negeri untuk pembangunan	Kredit pertanian dan industri kecil
6.	Bantuan luar negeri untuk membangun industri dan teknologi	Pengembangan BUMN	Mengundang modal asing dengan undang-undang penanaman modal asing
7.	Pengendalian penduduk dan transmigrasi	Membina kekuatan ekonomi pribumi lewat perdagangan	Membangun sektor swasta
8.	Membangun BUMN	Mendorong koperasi	Membangun perkebunan untuk ekspor

Sumber: Sumber: M. Dawam Rahardjo "Habibienomics, Telaah Ekonomi Pembangunan Indonesia" hal 28.

Tampaknya koperasi Hatta, yang lebih menekankan pada solidaritas sosial, lebih praktis dan mudah dipahami bahkan oleh kelas terendah; ekonomi Sumitro lebih masuk akal untuk menjadi panduan ekonomi nasional bagi pemerintah yang berkuasa pada masa itu; Dan Sosialisme Keagamaan Sjafruddin sulit untuk ditangkap, terlebih lagi, diterapkan pada tingkat mikro (perorangan) atau tingkat makro (nasional).

Menurut Raharjo (2009), pemikiran dan pembahasan tentang sistem ekonomi Indonesia secara komprehensif dimulai oleh Mohammad Hatta dengan buku kecilnya yang berjudul "Ekonomi Terpimpin" terbit pada tahun 1967, yang intinya adalah orde ekonomi yang didasarkan pada Demokrasi Ekonomi.¹⁷ Namun ide Hatta tentang ekonomi terpimpin

¹⁷ M. Dawam Raharjo. "Menuju sistem perekonomian Indonesia." UNISIA 32.72

sangat berbeda penerapannya yang dilakukan oleh Sukarno. Sistem ekonomi dipimpin sangat condong pada sosialis. Ciri itu terlihat dari keterlibatan pemerintah dalam mengendalikan sekaligus mengontrol keberlangsungan hidup rakyat Indonesia dalam segala bidang, merupakan salah satu cara Soekarno dalam upaya menciptakan demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi.

Pada akhir dasawarsa '70-an dicapai titik keseimbangan menjadi Sistem Ekonomi Pancasila. Adapun karakter dari sistem ekonomi pancasila terdiri dari lima poin. Pertama, peranan badan usaha negara dan khususnya koperasi yang sangat penting (Mubyarto & Boediono, 1980). Kedua, insentif ekonomi dioperasionalkan dengan dasar nilai sosial dan agama. Ketiga prinsip-prinsip egalitarian yang mendukung persamaan sosial yang paling besar akan sangat diprioritaskan. Keempat, menciptakan perekonomian yang tangguh. Terakhir, keseimbangan antara desentralisasi keputusan ekonomi dan perencanaan nasional yang tangguh.

Hadirnya sistem ekonomi pancasila manusia yang diinisiasi kebanyakan oleh para ekonom UGM menuai pro dan kontra. Arief Budiman misalnya melontarkan kritik bahwa konsep SEP tidak didasarkan pada konsep manusia yang jelas sebagaimana dalam kapitalisme yang landasan teori manusianya tercermin dalam asumsi *homo-economicus*, sedangkan dalam Sosialisme, landasan teorinya adalah konsep *homosocius* (Raharjo, 1980). Ide sistem ekonomi pancasila hanya muncul dalam tataran konsep saja, dan penerapannya dalam kebijakan pemerintah tidak pernah terjadi.

Jejak kapitalisme di Indonesia lebih terlihat di era pemerintahan Orde Baru tepatnya dimulai sejak Maret 1966. Orientasi pemerintahan Orba sangat bertolak belakang dengan era sebelumnya. Kebijakan Orba lebih berpihak kepada Barat dan menjahui ideologi komunis di masa Sukarno. Menjelang awal tahun 1970-an atas kerja sama dengan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB) dibentuk suatu konsorsium InterGovernment Group on Indonesia (IGGI) yang terdiri atas sejumlah negara industri maju termasuk Jepang untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Saat itulah Indonesia dianggap telah menggeser sistem ekonominya dari sosialisme lebih ke

(2009). hal. 126-127.

arah semikapitalisme.¹⁸

Liberalisasi ekonomi sangat terlihat di awal 80 an sampai 90 an seperti dengan dikeluakannya Kebijakan Pakto 88, Pakdes 88 dan Pakjan 90 (yang berisi deregulasi di sektor perbankan dan pasar modal) dapat dianggap sebagai titik tonggak kebijakan libelarisasi ekonomi di Indonesia. Sektor swasta diharapkan berperan lebih besar karena pemerintah dianggap telah gagal dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, baik yang berasal dari eksploitasi sumberdaya alam maupun hutang luar negeri (Rachbini, 2001). Masa pembangunan ekonomi Orde Baru-pun akhirnya berakhir dengan munculnya krisis moneter Asia 1997-98 dan sekaligus berakhirnya era orde baru Suharto.

Selanjutnya, setelah terjadi krisis moneter, isu Islamisasi ekonomi mulai muncul dengan ditandai berdirinya bank pertama Syari'ah yaitu Bank Muamalat Indonesia. Pada periode ini sekitar tahun 1990-an, pemikiran dan gerakan ekonomi Islam berkembang dalam dua tataran, yakni tataran teoritis dan praktis. Pada tataran teoritis dikembangkan melalui pendidikan tinggi, kajian keilmuan dan perkembangan riset-riset Islamisasi ekonomi. Pada tataran praktis dikembangkan mulai dari sektor moneter, bank umum, BPRS, BMT, pengembangan pengelolaan zakat produktif, asuransi dan bursa saham Islam serta pegadaian Islam (Quraisy, 2002).¹⁹ Dalam ekonomi Islam, peran agama dalam sistem ekonominya sangat penting, yang para para pelakunya dibatasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

Saat ini, ekonomi Islam telah banyak berperan dalam perekonomian nasional dalam beberapa kebijakan ekonomi negara. Insititusi negara pun dibentuk untuk mendukung perkembangannya. Dibentuknya direkorat ekonomi dan keuangan Syari'ah di Bank Indonesia, Direktorat Pembiayaan Syariah di Kementrian Keuangan dan lainnya.

¹⁸ Tulus Tambunan. *Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. 1998.

¹⁹ Mujahid Quraisy. "Dinamika Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia." *Muqaddimah* No. 12 thn. VII.

6. Telaah Pengaruh Rasionalisme dalam Ekonomi Indonesia

Pengaruh rasionalisme dalam ekonomi Indonesia telah terlihat pasca kemerdekaan Indonesia dalam menentukan arah kebijakan ekonominya. Pada masa orde lama, pengaruh ekonomi Sosialisme lebih terlihat dan pada order baru lebih banyak digunakan paham Kapitalisme. Kedua paham ini secara garis besar terpengaruh oleh paham rasionalisme. Ciri dominannya adalah peranan akal dalam keputusan ekonomi menjadi sumber utama dan nilai religius tidak menjadi pertimbangannya. Adapun yang membedakannya dari kedua kutub paham ekonomi ini sejauh mana intervensi pemerintah dalam keputusan-keputusan ekonomi.

Prinsip-Prinsip ekonomi terpimpin Sukarno terlalu berfokus kepada mengurangi ketergantungan atas modal-modal asing serta membuat perekonomian Indonesia menjadi tertutup dan anti terhadap modal asing. Akibatnya, karena tidak bisa mengikuti perkembangan pasar yang terbuka, terjadilah krisis di dalam perekonomian Indonesia. Selain itu dalam kebijakannya, ide nasionalis, agama dan komunis (NASAKOM) tidak mampu menjadi resep mujarab dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, karena secara basis falsafah pemahamannya berbeda. Contohnya, agama dan komunis selamanya tidak akan bertemu, karena bagi para penganut komunisme agama adalah halangan utama dalam kehidupan manusia.

Di masa order baru, paradigma ekonomi Kapitalis menjadi pilihan dengan melakukan liberalisasi ekonomi. Tumpuan pembangunan ekonomi dimandatkan pada sektor swasta karena pemerintah dianggap tidak mampu melakukan itu. Hal ini juga merupakan ciri dari rasionalisasi ekonomi yang ditandai dengan munculnya kebijakan-kebijakan liberalisasi ekonomi seperti kemudahan dalam mendirikan bank dan pembukaan pasar modal yang cenderung pada ekonomi pasar. Tidak hanya pada tingkat kebijakan, di tingkat pendidikan ajaran-ajaran Kapitalisme lebih condong diajarkan kepada peserta didik, sehingga ciri manusia *homo-economicus* lebih mendarah daging pada diri manusia Indonesia.

Baik Sosialisme dan Kapitalisme, ternyata tidak memberikan resep ampuh dalam kesejahteraan rakyat Indonesia. Di awal tahun 90 an, kebangkitan ekonomi berbasis agama mulai didengungkan di negara yang mayoritas Muslim ini, dengan melihat kesuksesan negara tetangganya, Malaysia yang telah menerapkan sistem ekonomi Islam di beberapa sektor ekonominya. Ciri ekonomi Islam agak berbeda dengan

ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme, yang mana peranan akal tidak menjadi absolut, dan prinsip dan nilai agama menjadi dasar fondasi pengetahuannya. Dalam Islam, akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama, karena akal dapat mengetahui Tuhan dan sifat-sifat-Nya, begitu juga kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan manusia untuk memperoleh kebahagiaan kelak. Meskipun demikian, Wahyu tetap dianggap sebagai penguat dan pengontrol terhadap apa yang diputuskan oleh akal.

Maka, dalam perkembangan ekonomi Indonesia rasionalisme mempunyai pengaruh yang tinggi. Hal itu terlihat dengan mengaplikasikan dua sistem ekonomi besar yaitu Kapitalisme dan Sosialime dalam perkembangannya. Rasionalisme adalah asas atau fondasi dalam teori-teori kedua sistem ekonomi besar itu.

7. Rationalisme dan Ekonomi Islam

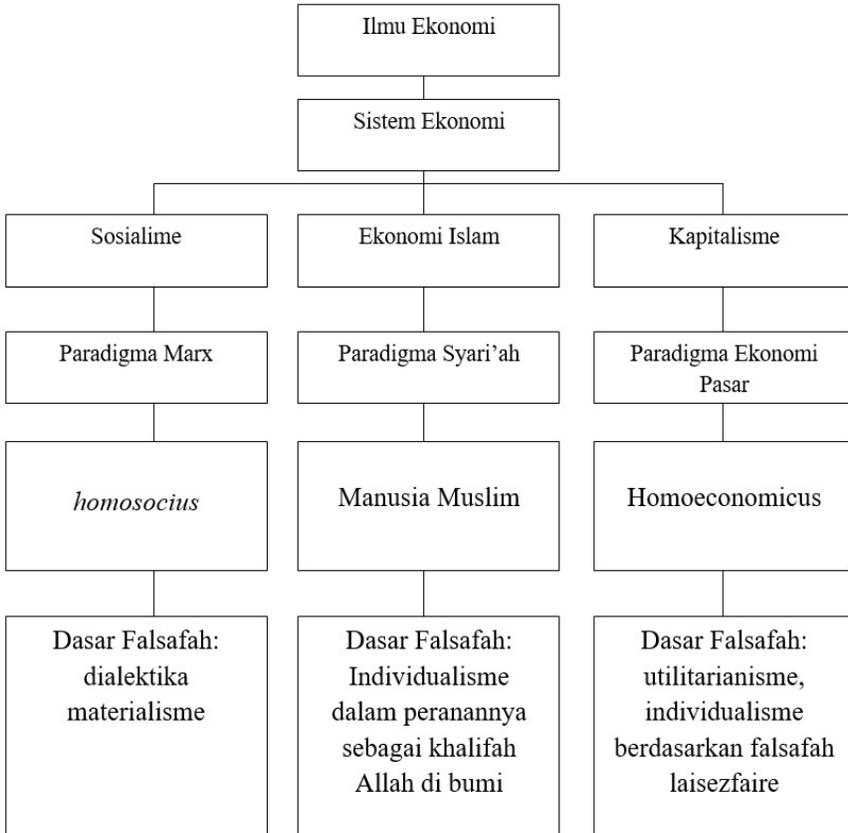
Siddiqi (1979) mendefenisikan rasionalitas individu Muslim sebagai perilaku individu manusia untuk mencapai suatu yang maksimal sesuai dengan norma-norma Islam.²⁰ Menurut Agil (1989) rasionalitas mengandung arti bahwa perilaku akan menuju kepada *falah* (kesuksesan di dunia dan akhirat), yang hanya bisa dicapai jika perilaku manusianya cocok dengan norma-norma Islam.²¹ Dapat dikatakan bahwa rasionalitas manusia Muslim seharusnya harus selalu dipandu oleh norma-norma Islam yang bersumber dari Qur'an dan Sunnah.

Munculnya ekonomi Islam, rasionalisme yang hanya menggunakan akal semata sebagai sumbernya mulali ditinggalkan. Dalam Islam, wahyu dan akal adalah sumber utama dalam mencari kebenaran. Peran moral terutama yang berasal dari nilai-nilai agama menjadi batasan utama dalam sistem ekonomi Islam atau disebut dengan paradigma Syari'ah. Perbedaan-perbedaan tersebut digambarkan dalam diagram 2.

²⁰ M.N. Siddiqi. *The Economic Enterprise in Islam*, Lahore: Islamic Publication, 1979. h. 90.

²¹ Syed Omar Syed Agil. *Rationality in economic theory: A critical appraisal*. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 1989, 2.2. hal. 91.

Diagram 2: Basis fondasi Mikro dan Implikasinya dalam Sistem Ekonomi



Sumber: Muhammad Arif

Jika dalam ekonomi konvensional manusia disebut rasional ketika dapat memaksimumkan utilitas (konsumsi) dan keuntungan (Produksi), maka memaksimalkan *masalah* merupakan kombinasi wahyu dan akal itu inti dari ekonomi Islam. Hal ini sejalah dengan pendapat Imam Ghazali, tempatnya alasan dikuatka dengan penggunaan pemikiran-pemikiran masalah yang mana fakta dan nilai disatukan dan dikoneksikanke dalam Syari'ah melalui maqasid.²² Mannan (1993), who explained that rationality in Islamic economics always emphasizes on the benefit and welfare aspects.²³ Karena itu Norma-norma (Syari'at) sangat diperlukan

²² Al-Ghazali. Al-Mustasfâ fi 'Ilm al-Usul. Cairo: Al-Maktaba at-Tijariya. 1937.

²³ M. Abdul Mannan. "Islamic Economic, Theory And Practice, diterjemahkan oleh M." Nastangin. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf (1993).

yang memandu perilaku rational ekonominya. Sehingga manusia dalam menopang kehidupan kehidupannya harus menyeimbangkan dari apa yang diperlukan dalam dirinya meliputi aspek materi, sosial dan spiritual yang mengantarkannya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Perilaku manusia Muslim (*Islamic man*) itu rasional karena sesuai dengan aturan-aturan Syari'at yang bertujuan menciptakan suatu masyarakat yang seimbang.

Dalam prakteknya rasionalitas konsumsi daisumsikan bahwa pelaku konsumsi itu tidak hanya dibatasi (*Constraint*) dengan pendapatannya tetapi juga dengan aspek norma-norma Islam yang bersumber dari Qur'an dan Sunnah, seperti aspek berbagi sesama manusia melalui zakat, infaq, sedekah dan wakaf, menjauhi perilaku boros (*tabzir*), berlebih-lebihan (*Israf*), tamak dan kirik, dan membeli barang konsumsi yang halal saja.

Sedang rasionalitas distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam mewujudkan ekomomi pasar yang bebas dengan perangkat regulasinya yaitu mencengah terjadinya konsentrasi kekayaan hanya pada sebagian orang saja dengan cara yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah seperti membayar zakat, memberikan sedekah, infaq dan wakaf kepada yang berhak dan memerlukannya; dan menjauhi jual beli uang melalui sistem riba dengan cara mengembangkan sistem jual beli atau perserikatan modal usaha. Dalam produksi, perusahaan dalam memaksimalkan profitnya harus sesuai dengan rasionalitas etika dan spritual perilakunya dalam memproduksi barang-barang konsumsi yang dibutuhkan masyarakat. Hasil produksi diharapkan tidak berdampak pada eksternalitas yang negatif tetapi kepada sesuatu yang positif bagi kemaslahatan orang banyak. Kemudian barang-barang yang dihasilkan harus memenuhi standard kehalalan dan tayyibah yang telah ditetapkan dalam Islam.

Dalam parakteknya, ekonomi dan keuangan Islam terus berkembang yang menjadi solusi umat dalam beraktivitas ekonomi. Perbankan Islam, pasar modal Islam, asuransi Islam, gadai Islam, dan keuangan sosial Islam telah memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

7. Kesimpulan

Falsafah rasionalis sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, yang membedakannya adalah sistem yang digunakannya yaitu Kapitalisme atau Sosialisme. Karena pada hakikatnya Kapitalisme dan Sosialisme mempunyai kesamaan falsafah yang melandasinya yaitu rasionalismenya yang mengedepankan akal semata. Indonesia pernah menggunakan kedua paham ekonomi tersebut dalam kebijakan-kebijakan ekonominya.

Adanya usaha para akademis dalam mengembangkan konsep ekonomi berbasis falsafah pancasila, bukan hanya terfokus aspek yang rasional tapi menanamkan nilai-nilai pancasila pada aktivitas individu-individu manusia Indonesia. Ekonomi Pancasila merupakan Sistem Ekonomi yang khas (berjati-diri) Indonesia, yang digali dan dikembangkan berdasar kehidupan ekonomi riil (real-life economy) rakyat Indonesia yang berdasarkan falsafah pancasila yang telah dirumuskan oleh founding father Indonesia. Namun demikian, ide ini tidak sepenuhnya diterapkan oleh pemerintah. Mayoritas ekonom dan teknokrat masih skeptis terhadap keberadaan (eksistensi) dan urgensi Ekonomi Pancasila sebagai alternatif ekonomi konvensional.

Selanjutnya dalam perkembangannya, dengan datangnya ekonomi Islam di Indonesia paham rasionalisme tidak lagi menjadi pilihan utama, karena akal bukanlah menjadi sumber utama dalam ekonomi Islam. Wahyu sebagai pedoman nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi sumber utamanya setelah akal. Sehingga, akal bukan lah satu-satunya sumber menemukan realitas kebenaran. Dalam perkembangannya hingga saat ini Ekonomi Islam terus berkembang maju dan mendapatkan dukungan yang penuh dari pemerintah Indonesia. Institusi keuangan Syari'ah, Institusi keuangan sosial beserta regulasi dan kebijakannya terus berkembang maju di Indonesia melalui dukungan seluruh stakeholder yang konsen dalam pengembangan ekonomi Islam.

Referensi

- Agil, O. S.; Omar, Syed. *Rationality in economic theory. Readings in Microeconomics: an Islamic Perspective*. Kuala Lumpur: Longman, 1992.
- Arif, M. (1989). *Towards Establishing the Microfoundations of Islamic*

- Economics: The Basis of the Basics. *Readings in the concept and methodology of Islamic economics*. Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publications, 96-119.
- Al-hakim, Muhammad Hanif. "A Nexus between Identity Awareness and Decolonization Process of Local Economy: Indonesian Experience." *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 1.1 (2017): 1-20.
- Bagus, L. (2002), *Kamus Filsafat*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Barus, Z. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2).
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), p.77-101. Retrieved from http://eprints.uwe.ac.uk/11735/2/thematic_analysis_revised_-_final.pdf, accessed on February 10, 2020. h. 6.
- Chapra, M. U. (2001). *Masa depan ilmu ekonomi: sebuah tinjauan Islam*. Gema Insani.
- Edwards, P., (1967), *The Encyclopedia of Philosophy Volume 7*, New York, The Macmillan Company & The Free Press, 1967.
- Heyne, P. (1997). *Rationalism and Anti-Rationalism in the Origins of Economics: The Philosophical Roots of 18th Century Economic Thought*, by Coleman William Oliver. Edward Elgar Publishing Ltd., Aldershot and Brookfield. 1995. Pp. viii, 177. \$63.95. ISBN 1 85278 995 6. *Journal of the History of Economic Thought*, 19(2), 312-314.
- Jahagirdar, J. R. *Collected Works of Justice RA Jahagirdar (Retd)*.
- Lacey, A.R., (2000), *A Dictionary of Philosophy*, New York, Routledge.
- Moser, P. K., & Vander Nat, A. (1995). *Human Knowledge: Classical and Contemporary Approaches* (2nd ed.). New York: Oxford University Press.
- Mubyarto dan Boediono. (1980). "Ekonomi Pancasila" in Mubyarto and Boediono (eds) *Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta, Fakultas Ekonomi.
- Prawiroharjono, Sutrisno. "Kapita Selekta Ekonomi Indonesia." Yogyakarta: Andi Offset (1992).
- Pusey, Michael (1991), *Economic Rationalism in Canberra*. Ch.4-5, pp.134-160, the Cambridge University Press, USA

- Quraisy, Mujahid. (2002). "Dinamika Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia", dalam Muqaddimah No. 12 thn. VII.
- Rahardjo, M. Dawam. "Menuju sistem perekonomian Indonesia." *UNISIA* 32.72 (2009). hal. 113-128.
- Rahardjo, M. Dawam. *Habibienomics: telaah ekonomi pembangunan Indonesia*. Pustaka Cidesindo, 1997.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *The economic enterprise in Islam.* , Lahore: Islamic Publication, 1979.
- Soekarno. (1965). *Dibawah Bendera Revolusi Jilid I*. Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.
- Suseno, Frans Magnis. (1980). *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tambunan, Tulus. (1998). *Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Wilardjo, S. B. (2009). "Aliran-Aliran dalam Filsafat Ilmu berkait dengan Ekonomi." *Value Added | Majalah Ekonomi dan Bisnis*, 6 (1).
<https://www.collinsdictionary.com/>